

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI PROVINSI  
SUMATRA SELATAN**



Skripsi oleh:

**ISSER MANALSAL**

**01081003639**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2013**

S  
657.661 598 161

lss  
p  
2013

C - 130844

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI PROVINSI  
SUMATRA SELATAN**



Skripsi oleh:  
**ISSER MANALSAL**  
01081003039  
**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2013**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF  
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH PADA 14  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATRA SELATAN

Disusun Oleh:

Nama : Isser Manalsal  
NIM : 01081003039  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang kajian/konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

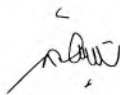
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing  
Kepala

Date


: 28 Februari 2013

  
Mukhtaruddin, SE, M. Si, Ak  
NIP. 196712101994021001

Anggota

Date

: 14 Januari 2013

  
Hj. Dewi Rina Komarawaty, SE, MM, BKP, Ak  
NIP. 196209131994032001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI PROVINSI  
SUMATRA SELATAN**

Disusun Oleh:

Nama : Isser Manalsal  
NIM : 01081003039  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang kajian/konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

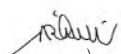
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 18 maret 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

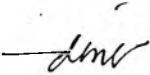
Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya,


Kepala

Anggota

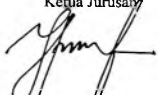
Anggota

  
Mukhtaruddin, SE, M. Si, Ak.  
NIP. 196712101994021001

  
Hi. Dewi Rina Komarawaty, SE, MM, BPK, Ak  
NIP. 196209131994032001

  
Abukosim, SE, MM, Ak  
NIP. 196205071995121001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

  
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196508161995121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isser Manalsal  
NIM : 01081003039  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Selatan

Pembimbing:

Ketua : Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak  
Anggota : Hj. Dewi Rina Komarawaty, SE, MM, BKP, Ak  
Tanggal Ujian Komprehensif : 18 maret 2013

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 18 maret 2013

Pembuat Pernyataan,



Isser Manalsal

NIM 01081003039

## KATA PENGANTAR

*Salam Sejahtera,*

Puji syukur kepada Bapa di Surga dan ucapan terima kasihku yang terbesar kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan berkatnya yang luar biasa, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATRA SELATAN”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., Kepala Jurusan Akuntansi.
2. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., Sekretaris Jurusan Akuntansi sekaligus merangkap Kepala Pembimbing Skripsi.
3. Hj. Dewi Rina Komarawaty, SE, MM, BKP, Ak., Anggota Pembimbing skripsi.
4. Abukosim, SE, MM, Ak selaku dosen tamu penguji pada ujian komprehensif yang telah memberikan masukan kepada skripsi saya.
5. Orang tua yang telah mendukung saya selama pengerjaan skripsi ini.

*Terima Kasih*

Inderalaya, 2012  
Penulis

Isser Manalsal

## ABSTRAK

### PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATRA SELATAN

Oleh:

Isser Manalsal;

Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak.

Hj. Dewi Rina Komarawaty, SE, MM,BKP,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh komponen pendapatan daerah yang dominan terhadap alokasi belanja daerah, khususnya pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatra Selatan untuk periode 2009 sampai dengan 2011. Pemilihan sample dominan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diambil dari 14 kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat sampel di Provinsi Sumatra Selatan. Sedangkan variabel belanja daerah diambil dari salah satu komponen belanja daerah yaitu belanja modal. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan realisasi anggaran APBD 14 kabupaten/kota di Sumatra Selatan. Metode analisis data menggunakan analisis multivariat dengan model regresi berganda, dengan asumsi tidak terdapat masalah dalam sampel tersebut. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berimplikasi secara positif baik secara simultan maupun parsial terhadap alokasi belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian - penelitian terdahulu dan berdasarkan pada teori yang melandasi yaitu *agency theory*.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, Laporan Realisasi APBD, Sumatera Selatan, teori agency*

## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF THE ORIGINAL INCOME OF DISTRICT AND THE GENERAL ALLOCATION FUND TO THE ALLOCATION IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

By:

Isser Manalsa;

Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak.

Hj. Dewi Rina Komarawaty, SE, MM,BKP,Ak

*This study was aimed at explaining the influence of the dominant component from the district income to the allocation of the district expense, especially in some cities in South Sumatera in 2009 until 2011. For this study, the dominant sample had been selected from the original income of district and the general allocation fund which was taken from 14 cities that were required in South Sumatera. The variable of the expense was taken from one component of the district expense which was the expense of asset. The data of this study was taken from the realization report of APBD fund in 14 cities in South Sumatera. In addition, the multivariate analysis with double regression model was used to analyze the data with the assumption that there was no problem on the sample. The statistic finding of the study showed that and the general allocation fund stimulatingly and partially gave a positive implication in the allocation of the district expense. This finding supported some previous researches. The result was also based on the agency theory as the basic theory of this study.*

*Key words: the original income of district, the general allocation fund, the district expense, the realization report of APBD, South Sumatera, agency theory*



## RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Isser Manalsal  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/23 juni 1990  
Agama : Kristen Protestan  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah (orang tua) : Jalan Indragiri K-12 Komp. Pusri Sukamaju,  
Simpang BLK  
Alamat Email : anime\_coolienz@yahoo.co.id

### Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar : SD Indriasana  
SLTP : SMP Xaverius 1 Palembang  
SMA : SMA Xaverius 1 Palembang

Pendidikan Non Formal : -

Pendidikan Organisasi : Anggota bagian divisi informasi dan komunikasi  
Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) FE Sriwijaya  
University, South Sumatera (2010-2011).  
Anggota LPM-GS pers mahasiswa Universitas  
Sriwijaya (2008-2012)

Penghargaan Prestasi : -

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Kegunaan Penelitian .....	9
1.5. Batasan Penelitian .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Teori Yang Digunakan .....	12
2.1.1. Agency Theory .....	14
2.1.2. Hubungan Keagenan Dan Penganggaran Sektor Publik .....	14
2.2. Penganggaran Sektor Publik .....	15
2.2.1. Anggaran Daerah .....	15

2.2.2. Konsep Anggaran Daerah .....	18
2.2.3. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah .....	19
2.2.4. Prospek Keuangan Daerah .....	20
2.2.5. Alokasi Anggaran Belanja Daerah .....	21
2.2.6. Pengertian Transfer Dana Dan Alokasi Umum.....	25
2.2.3. Pendapatan Asli Daerah .....	27
2.2.3. Dana Alokasi Umum .....	30
2.3. Penelitian Terdahulu .....	33
2.4. Kerangka Pemikiran .....	34
2.5. Hipotesis .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1. Jenis Dan Sumber Data .....	38
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	38
3.3. Populasi Dan Sampel .....	39
3.4. Definisi Operasional Variabel .....	40
3.5. Teknik Analisis Data.....	42
koefisien d4etreminasi (R2).....	25
Uji F.....	27
Uji T .....	30
<b>BAB IV DATA PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum	
Provinsi Sumatera Selatan.....	50
4.1.1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan .....	50
4.1.2. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan .....	51
4.2. Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera	
Selatan .....	51
4.2.1. Visi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan .....	50
4.2.2. Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan .....	50
4.3. Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.. ..	54

4.3.1. Kabupaten Banyuasin.....	54
4.3.2. Kabupaten Empat Lawang .....	55
4.3.3. Kabupaten Lahat .....	57
4.3.4. Kabupaten Muara Enim .....	58
4.3.5. Kabupaten Musi Banyuasin .....	59
4.3.6. Kabupaten Musi Rawas.....	61
4.3.7. Kabupaten Ogan Ilir.....	63
4.3.8. Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	63
4.3.9. Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	65
4.3.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .....	67
4.3.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	68
4.3.12. Kota Lubuk Linggau .....	69
4.3.13. Kota Pagar Alam .....	70
4.3.14. Kota Prabumulih .....	71
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
5.1. Hasil Penelitian .....	73
5.1.1. Statistik Deskriptif.....	73
5.1.2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	76
1. Hasil Uji Heterokedasitas.....	76
2. Hasil Uji Autokolerasi.....	78
3. Hasil Uji Multikolonieritas.....	79
4. Hasil Uji Normalitas.....	81
5.1.3. Hasil Uji Regresi Berganda.....	81
5.1.4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	82
5.1.5. Hasil Uji F .....	83
5.1.6. Hasil Uji T.....	84
5.2. Pembahasan Hipotesis .....	84
5.3. Tabel Pembahasan Hipotesis.....	90
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>

6.1. Kesimpulan.....	91
6.2. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.5.2.3 Tabel Pengambilan Keputusan Autokolerasi .....	46
Tabel 5.1.1. Tabel Statistik Deskriptif .....	73
Tabel 5.3.2. Tabel Hasil Uji Autokolerasi .....	77
Tabel 5.3.3. Tabel Hasil Uji Multikolonieritas .....	78
Tabel 5.3.5 Tabel Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirov.....	81
Tabel 5.4.1 Tabel Chi-Square .....	82
Tabel 5.4.2 Tabel Hasil Uji F.....	83
Tabel 5.4.3 Tabel Hasil Uji T.....	84
Tabel 5.3. Tabel Rangkuman Hasil Hipotesis.....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar 5.1. Hasil Uji Heterokedasitas .....	77
Gambar 4.2. Normal Probabily Plot .....	80

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Penerimaan APBD 14 Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan Tahun 2009.....	98
Lampiran 2	Laporan Realisasi Penerimaan APBD 14 Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan Tahun 2010.....	100
Lampiran 3	Laporan Realisasi Penerimaan APBD 14 Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan Tahun 2011.....	102
Lampiran 4	Laporan Realisasi Pengeluaran APBD 14 Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan Tahun 2009.....	104
Lampiran 5	Laporan Realisasi Pengeluaran APBD 14 Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan Tahun 2010.....	106
Lampiran 6	Laporan Realisasi Pengeluaran APBD 14 Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan Tahun 2011.....	108



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Andirfa, 2009).



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2007). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 (Andirfa, 2009), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumpersumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap

daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Menurut Halim (2007) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biayapenyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Permasalahan juga dialami dalam pengertian Dana Alokasi Umum yang terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika

daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Kesit, 2004).

Dalam Penerimaan APBD Pemerintah Daerah mendapatkan sumber dana dari Pemerintah pusat berupa dana perimbangan selain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang sah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan UU no. 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Andirfa, 2009)

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. (isdjijoso, 2002) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah,

organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Mardiasmo (2002:55) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dalam pengalokasian sumber penerimaan daerah melalui APBD, Pemerintah Daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada sumber daya yang diberikan pemerintah pusat. Dalam penelitian Arif (2002:23) mengungkapkan

Pemerintah Daerah jauh lebih besar mengalokasikan sumber daya yang berasal Dana Transfer Pemerintah Pusat daripada Pendapatan Asli Daerahnya.

Pengalokasian dana perimbangan yang begitu besar telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu bergantung kepada pemerintah pusatnya. Sebagian besar pemerintah daerah di Sumatra Selatan lebih memilih mengalokasikan dana yang didapat dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi belanja daerahnya daripada berusaha meminimalisasi penggunaan dana transfer tersebut dengan berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah kurang memperhatikan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya yang pada akhirnya kurang berkembangnya potensi daerah. Dari hasil peneliti sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap alokasi belanja daerah secara lebih mendalam khususnya Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu batas wilayah yang jelas antar daerah merupakan indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD dan Dana Alokasi Umum. Novi (2007:20) menyatakan bahwa dari 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 10 persen yang mempunyai penetapan batas wilayah yang resmi salah satunya adalah provinsi Sumatera Selatan. Penentuan batas wilayah sangat penting, sebab dengan adanya batas wilayah antar daerah akan dapat memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Adanya batas wilayah yang resmi akan diketahui sejauh mana batas status hukum, tanggung jawab pemerintahan, perpajakan, hingga untuk menentukan luas area guna untuk menghitung potensi sumber daya, kepadatan penduduk hingga dana perimbangan

daerah. Sehingga berpengaruh pada berapa besarnya pendapatan ataupun pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis memilih Provinsi Sumatera Selatan sebagai obyek penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Prakosa (2004) yaitu Pengaruh Dana Alokasi Umum dan PAD terhadap prediksi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY mengambil periode penelitian 2000-2002 sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja daerah menggunakan periode tahun 2009-2011 dengan sampel di 14 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, relatif lebih sempit daripada peneliti terdahulunya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan"**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah pemerintah daerah?
2. Apakah DAU berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah pemerintah daerah?



3. Apakah DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan untuk alokasi belanja pemerintah daerah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum pada alokasi Belanja Daerah Pada 14 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dari tahun 2009 hingga 2011.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan dalam penelitian ini berupa kontribusi empiris, teoridan kebijakan, yaitu

1. Kontribusi empiris pada pengaruh DAU dan PAD terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan
2. Kontribusi kebijakan untuk Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang
3. Kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya dilakukan pada daerah-daerah yang berada di wilayah provinsi Sumatra Selatan dan variabel Belanja daerah (Y) pada penelitian ini

dijelaskan oleh Belanja Modal. Daerah-daerah yang termasuk dalam penelitian ini adalah:

1. Kabupaten Lahat
2. Kabupaten Musi Banyuasin
3. Kabupaten Musi Rawas
4. Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu
6. Kota Muara Enim
7. Kabupaten OKU Selatan
8. Kota Prabumulih
9. Kota Pagar Alam
10. Kabupaten Banyuasin
11. Kabupaten Ogan Ilir
12. Kabupaten OKU Timur
13. Kota Lubuk Linggau
14. Kabupaten Empat Lawang

#### **1.6. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan lima bab, yaitu Bab 1, 2, 3, 4 dan Bab 5

Bab 1: PENDAHULUAN. Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori yang digunakan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Landasan teori membahas mengenai telaah teori dan penelitian sebelumnya

**Bab 3 METODE PENELITIAN.** Bab ini membahas mengenai jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan teknis analisis.

**Bab 4 DATA PENELITIAN.** Bab ini membahas spesifikasi data penelitian yaitu gambaran umum dan sejarah singkat provinsi Sumatera Selatan serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, dan daerah-daerah yang dijadikan objek variabel dalam penelitian ini.

**Bab 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini membahas hasil penelitian serta pembahasan atas hasil hipotesis penelitian data tersebut.

**Bab 6 KESIMPULAN DAN SARAN.** Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran yang ditujukan kepada Pemerintah Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kinerja sebagai bentuk pelayanan publik secara baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aebarge, Rolf & Audun Langorgen, (1997). *"Fiscal and spending behavior of local governments: An Empirical analysis based on Norwegian data"*. Statistic Norway, Discussion paper no. 196.
- Andersson, Lars. (2002). *"The effect of Swedish local public expenditure of a change in Swedish intergovernmental grant system"*. University of Lund, working paper.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habubullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. 2000. *The causal relationship between tax revenues and Government spending in Malaysia*. University Putra Malaysia, working Paper.
- Andirfa, Mulia. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Pemerintah Aceh)*. Jurnal Akuntansi 16 (4): 346-357. Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Soreide. 2001. *"Corruption: A review of contemporary research. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7."* Web: <http://www.cmi.no/>
- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Blackley, P. 1986. *Causality between revenues and expenditures of the size of Federal budget. Public Finance quarterly* 14: 139-156.
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Sumatra Selatan Dalam Angka*, BPS Sumatra Selatan.
- ..., 2011, *Banyuasin Dalam Angka*, BPS Banyuasin.
- ..., 2011, *Empat Lawang Dalam Angka*, BPS Empat Lawang.
- ..., 2011, *Lahat Dalam Angka*, BPS Lahat.
- ..., 2011, *Muara Enim Dalam Angka*, BPS Muara Enim.
- ..., 2011, *Musi Banyuasin Dalam Angka*, BPS Musi Banyuasin.
- ..., 2011, *Musi Rawas Dalam Angka*, BPS Musi Rawas.
- ..., 2011, *Ogan Ilir Dalam Angka*, BPS Ogan Ilir.
- ..., 2011, *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*, BPS Ogan Komering Ilir.

- ...., 2011, *Ogan Komering Ulu Dalam Angka*, BPS Ogan Komering Ulu.
- ...., 2011, *Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka*, BPS Ogan Komering Ulu Selatan.
- ...., 2011, *Ogan Komering Ulu Timur Dalam Angka*, BPS Ogan Komering Ulu Timur.
- ...., 2011, *Lubuk Linggau Dalam Angka*, BPS Lubuk Linggau.
- ...., 2011, *Pagar Alam Dalam Angka 2010-2011*, BPS Pagar Alam.
- ...., 2011, *Prabumulih Dalam Angka*, BPS Prabumulih.
- ...., 2011, *Sumatera Selatan Dalam Angka*, BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Chang, Tsangyao & Yuan Hong Ho. 2002. "Tax or spend, what cause what: Taiwan's experience ". *International Journal of Business and economics* 1(2): 157-165.
- Carr, Jered B. & Ralph S. Brower. 2000. "Principled opportunism: Evidence from the organizational middle." *Public Administration Quarterly* (Spring): 109-138.
- Darwanto, Yustikasari, Yulia, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*, Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007
- Gamkhar, Shama & Wallace Oates. 1996. "Asymetries in response to increase And decrease in intergovernmental grants: Some empirical findings." *National Tax Journal* 49 (4):501-512.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4 Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. "Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation." Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Harianto, David & Adi Priyo Hadi. 2007. "Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita." Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/131/>. Situs Data Perimbangan Daerah: Data Keuangan Daerah.

- Hoover, Kevin D. & Steven M. Sheffrin. (1992). "Causation, spending, and taxes: Sand in the Sandbox or tax collector for the welfare state?" *The American Economics Review* 82 (1): 225-248.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. 1994. "Intertemporal Analysis of state in local government spending: Theory and test". *Journal Of Urban Economics* 35: 159-174.
- Isdijoso, Brahmantio, 2002. "Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)", *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 6 No. 1 Hal 103-106.
- Joulfaian, D. & R. Mookerjee. 1990. "The interporal relationship between State and local government revenues and expenditures: Evidence from OECD countries." *Public Finance* 45: 109-117.
- Khairani, Siti. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah: Studi Kepulauan Bangka Belitung*" *Kajian Ekonomi*, vol 7 No. 1, 54-75.
- Kasper, Wolfgang & Manfred E. Streit. 2001. "Institutional Economics: Social Order and Public Policy." Cheltham, UK: Edward Elgar.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Lane, Jan-Erik. 2003. "Management and public organization: The principal-agent framework." University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. 2001. "Non-linier and asymetrics adjustment in the local revenue -expenditure models: some evidence from the Italian municipalities." University of Milan. Working paper.
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. "Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed." *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada*

- Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Maulida, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Kajian Ekonomi, vol 7 No. 1, 54-75.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Andi, Yogyakarta.
- Moc, T. M. 1984. "The new economics of organization." American Journal of Political Science 28(5): 739-777.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Petrie, Murray. 2002. "A framework for public sector performance contracting." OECD Journal on Budgeting: 117-153.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis pengaruh dana Alokasi Umum dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi jawa tengah dan DIY)". Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 8, 101-118.
- \_\_\_\_\_. UU No. 25 Tahun 1999, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Ross, Stephen A. 1973. "The economic theory of agency: The principal's problem." American Economic Review 63(2): 134-139.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. "Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah dalam Otonomi". Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uman, *Research Method for Business : A skill Building Approach, 7th Edition*, New York: John Wiley and Sons, 2002.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Samudra, Ashari A., (1993). *Perpajakan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiabudi, Widya, (2006). *Modul: Statistik Deskriptif*, \_\_\_\_\_, Jakarta.

- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. "*Principals and agents: An explanatory model of public budgeting.*" Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (Fall): 325-353.
- Stiglitz, Joseph E. 1999. "*Economics of the Public Sector. Third edition.*" New York: W.W. Norton & Company.
- Strom, K. 2000. "*Delegation and accountability in parliamentary democracies.*" European Journal of Political Research 37: 261-289.
- Solikin, Ikin. 2007. "*Hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal di Jawa Barat.*" 27 Januari 2012. <[http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/19651012200121-IKIN\\_SOLIKIN/Jurnal\\_PAD.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/19651012200121-IKIN_SOLIKIN/Jurnal_PAD.pdf)>
- Sukriy, Halim Abdullah (c), *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Syaiful. 2006. *Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan.* 4 Maret 2012. <<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>>
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Yuwono, Sony. 2005. *Penganggaran Sektor Publik.* Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Yustikasari, Yulia, 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*, Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Yuhertiana, I. 2003. "*Principal-agent theory dalam proses perencanaan anggaran sektor publik.*" Kompas – Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi (September-Desember): 403-422.

